



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang perlindungan hukum terhadap konsumen pemesanan barang di konveksi TEES Inc tinjauan ekonomi syariah belum pernah kami temukan sebelumnya. Namun ada beberapa penelitian terdahulu yang membahas terkait pemesanan barang (*salam*) dan undang-undang no.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Dalam hal ini, peneliti mengambil beberapa penelitian terdahulu terkait pemesanan barang (*salam*) dan undang-undang no.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen sebagai analisa dan perbandingan dalam penulisan laporan penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu tersebut antara lain :

1. Penelitian Umiyati

Penelitian yang dilakukan oleh Umiyati merupakan penelitian kualitatif dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pesanan Barang (Studi Kasus Di Toko Mebel Mia Jaya Abadi Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara)** yang ditulis pada tahun 2008 untuk memenuhi tugas akhir atau skripsi di Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang. Dalam penelitian ini membahas mekanisme akad yang terjadi di mebel Mia Jaya Abadi secara jual beli langsung barang yang sudah tersedia atau secara pesanan bagi barang yang belum ada dengan memberikan gambaran spesifikasi barang tersebut yang dalam hal ini menggunakan akad *salam*.

Secara akad *salam* kedua belah pihak melakukan perjanjian yang disaksikan oleh dua orang saksi atas transaksi akad tersebut yangmana pihak mebel sebelumnya telah menjelaskan spesifikasi barang yang dipesan dari aspek jenis, sifat, ukuran, batas waktu, harga dan tempat penyerahan. Selain itu, Tidak hanya memperhatikan mekanisme akad yang terjadi melainkan meninjau kembali berdasarkan hukum Islam. Secara hukum Islam akad *salam* yang terjadi di mebel Mia Jaya Abadi diperbolehkan selama syarat-syarat dan rukun-rukunnya terpenuhi. Namaun terlepas dari kesempurnaan terkadang terjadi kesalahan yang memicu kecacatan dan ketidak sesuaian barang pesanan sebagaimana yang telah

disampaikan pemesan dalam akad serta memotong sebagian dari uang pesanan dan hal ini yang tidak diperbolehkan karna bertentangan dengan syariat Islam.¹

Adapun perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah penelitian umiyati yang membahas lebih spesifik kepada tinjauan Hukum Islam dari aspek akad pemesanan barang (*salam*) serta mekanismenya saja di mebel Mia Jaya Abadi. Sedangkan penelitian ini membahas mekanisme pemesanan barang (*salam*) di konveksi TEES Inc dan membahas undang-undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen guna memberikan perlindungan/kepastian hukum bagi konsumen jika terjadi sengketa serta meninjau hal tersebut dari Ekonomi Syariah. Selain itu, Adapula persamaan dengan peneliti ini yaitu penelitian umiyati adalah sama-sama membahas terkait pemesanan barang (*salam*).

2. Penelitian Isnatul Fitriyah

Penelitian yang dilakukan oleh Isnatul Fitriyah merupakan penelitian yuridis sosiologis atau empiris dengan judul **Pelaksanaan Akad Sewa Kamar Kos Bagi Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam** yang ditulis pada tahun 2012 untuk memenuhi tugas akhir atau skripsi di Universitas Islam Negeri Maliki Ibrahim Malang. Dalam penelitian ini membahas pelaksanaan akad sewa kamar kos antara pemilik kos dengan mahasiswa UIN

¹Umiyati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pesanan Barang (Studi Kasus Di Toko Mebel Mia Jaya Abadi Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara)* (Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2008).

Maulana Malik Ibrahim Malang. Pelaksanaan akad sewa tersebut secara tradisi terjadi dengan sangat sederhana yaitu mahasiswa mendatangi pemilik kos dan melakukan perbincangan terkait transaksi sewa kamar kos yang saling sepakat sehingga terjadi ketidakjelasan akad/perjanjian masa sewa kamar kos.

Ketidakjelasan akad/perjanjian masa sewa kamar kos memicu terjadinya kesenjangan antara dua belah pihak sehingga salah satu pihak merasa terugikan. Secara tinjauan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terdapat kesenjangan dalam asas keadilan sehingga salah satu pihak dirugikan yang dalam hal ini adalah konsumen. Selain itu secara hukum Islam hal tersebut tidak sesuai dengan asas akad yakni *luzum*/tidak berubah karena akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi dan *maisir* dan tidak sesuai dengan asas transparansi karena tidak adanya pertanggungjawaban pemilik kos kepada penyewa secara terbuka dalam kesepakatan akad *Ijarah*.²

Adapun perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah Isnatul Fitriyah yang membahas lebih spesifik kepada sewa kamar kos bagi mahasiswa UIN Maliki Ibrahim Malang. Dalam hal ini menggunakan akad *ijarah*. Selain itu, Meninjau hal tersebut dari aspek undang-undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang khususnya membahas asas ketidakadilan sehingga

²Isnatul Fitriyah, *Pelaksanaan Akad Sewa Kamar Kos Bagi Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam* (Malang: Universitas Islam Negeri Maliki Ibrahim Malang)

salah satu pihak dirugikan yaitu konsumen serta meninjau dari hukum Islam terkait asas akad. Sedangkan penelitian ini membahas mekanisme pemesanan barang (*salam*) di konveksi TEES Inc dan membahas undang-undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen guna memberikan perlindungan/kepastian hukum bagi konsumen jika terjadi sengketa serta meninjau hal tersebut dari ekonomi syariah. Selain itu, Adapula persamaan dengan penelitian Isnatul Fitriyah adalah sama-sama membahas undang-undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

3. Penelitian Fadli Zaini Dalimunthe

Penelitian yang dilakukan oleh Fadli Zaini Dalimunthe merupakan penelitian yuridis sosiologis dan sifat penelitian deskriptif dengan judul **Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pemakai Layanan Operator Selular Telkomsel Cabang Padang** yang ditulis pada tahun 2011 untuk memenuhi tugas akhir atau skripsi di Universitas Andalas Padang. Dalam penelitian ini membahas perlindungan hukum bagi pemakai layanan operator telkomsel yang telah dimuat dalam kartu perdana maupun di perjanjian berlangganan. Selain itu, pihak telkomsel selaku pemilik usaha menjamin kesediaan untuk mengikuti upaya penyelesaian sengketa secara patut. Dalam penelitian ini membahas pula terkait kendala dalam penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang disingkat BPSK yaitu secara internal BPSK belum memiliki kekuatan hukum yang kuat berdasarkan pasal 45 ayat 2 Undang-undang No. 8

Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen sedangkan proses penyelesaian sengketa yang dilakukan BPSK dalam kasus telkomsel ini dengan cara konsiliasi yaitu BPSK bertugas mempertemukan para pihak yang bersengketa, dan penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak dengan cara perundingan atau musyawarah dan hasilnya diserahkan kepada BPSK guna dibuatkan keputusan.³

Adapun perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah Penelitian Fadli Zaini Dalimunthe yang membahas lebih spesifik kepada perlindungan konsumen pemakai layanan operator telkomsel sebagaimana telah dicantumkan dalam kartu perdana dan perjanjian dalam berlangganan. Selain itu, membahas pula kendala dalam penyelesaian sengketa melalui BPSK serta proses penyelesaian sengketa konsumen terhadap layanan operator selular telkomsel yang merugikan konsumen di kota Padang. Sedangkan penelitian ini membahas mekanisme pemesanan barang (*salam*) di konveksi TEES Inc dan membahas undang-undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen guna memberikan perlindungan/kepastian hukum bagi konsumen jika terjadi sengketa serta meninjau hal tersebut dari ekonomi syariah. Selain itu, adapula persamaan dengan peneliti kedua yaitu Penelitian Fadli Zaini Dalimunthe yang sama-sama membahas undang-undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

³Fadli Zaini Dalimunthe, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pemakai Layanan Operator Selular Telkomsel Cabang Padang* (Padang: Universitas Andalas Padang)

Penelitian yang peneliti lakukan ini merupakan penelitian empiris dengan judul **Praktek Pemesanan Barang Di Konveksi TEES Inc Kedungkandang Malang Tinjauan Ekonomi Syariah** yang ditulis pada tahun 2013 untuk memenuhi tugas akhir atau skripsi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dalam penelitian ini membahas praktek pemesanan barang di konveksi TEES Inc Kedungkandang Malang Tinjauan Ekonomi Syariah. Untuk mengkaji kembali fenomena pemesanan barang yang terjadi di konveksi TEES Inc berdasarkan Ekonomi Syariah serta mengkaji kasus komplain yang sering terjadi di konveksi TEES Inc Kedungkandang Malang.

Adanya komplain memicu terjadi perselisihan antara dua belah pihak yang bertransaksi sehingga mengharuskan terjadinya upaya penyelesaian sengketa yang berpacu pada undang-undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Dalam hal ini khususnya terjadi perselisihan terkait ketidak sesuaian produk yang dihasilkan produsen atas harapan konsumen sebagaimana dalam akad. Selain itu, dalam penelitian ini membahas mekanisme transaksi yang terjadi di konveksi TEES Inc yang mana transaksi tersebut menggunakan akad pemesanan barang (*salam*) serta tinjauan ekonomi syariah dari aspek mekanisme transaksi pemesanan barang sampai perlindungan hukum bagi konsumen ketika terjadi perselisihan.

Table 1 : Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Objek Formal	Objek Material
1.	Umiyati (Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2008)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pesana Barang (Studi Kasus Di Toko Mebel Mia Jaya Abadi Kec. Tahunan Kab. Jepara)	Pemesanan barang (<i>Salam</i>)	Akad
2.	Isnatul Fitriyah (Universitas Islam Negeri Maliki Ibrahim Malang, 2012)	Pelaksanaan Akad Sewa Kamar Kos Bagi Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam	Persewaan Kos	Akad Persewaan Kos
3.	Fadli Zaini Dalimunthe (Universitas Andalas Padang, 2011)	Perlindungan Hukum bagi Pemakai Layanan Operator Selular Telkomsel Cabang Padang	Perlindungan Hukum	Pemakai layanan operator selular
4.	Salahuddin Al Ayubi (Universitas Islam Negeri Malanag, 2013)	Praktek Pemesanan Barang di Konveksi TEES Inc KedungKandang Malang Tinjauan Ekonomi Syariah	Pemesanan Barang (<i>Salam</i>)	Mekanisme Transaksi pemesanan barang

Dalam tinjauan pustaka, selain membahas penelitian terdahulu sebagaimana diuraikan di atas yaitu membahas uraian konsep dan teori yang mendasar terkait dengan penelitian yang peneliti lakukan sebagai dasar analisis penelitian tersebut. Oleh karena itu, Peneliti berusaha nguraikan bebrapa konsep dan teori terkait dengan penelitian yang diteliti sebagaimana berikut.

B. Hukum Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.⁴ Az.Nasution berpendapat bahwa hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen, di dalam pergaulan hidup.⁵

1. Sumber-sumber hukum konsumen

Tujuan hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) pada masyarakat yang khususnya sebagai konsumen. Karena seiringnya kemajuan era globalisasi yang menuntut konsumen agar lebih cerdas memilih dan memilah produk yang dihasilkan produsen. Selain itu tidak ada perlindungan yang

⁴Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsuen Pasal 1 ayat 1.

⁵Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 13.

seimbang menyebabkan konsumen berada pada posisi lemah. Oleh karena itu dibutuhkan regulasi seperti Undang-undang no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan hukum guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi konsumen dan produsen. Selain undang-undang perlindungan konsumen, ada beberapa sumber-sumber hukum konsumen antara lain :

a. Undang-Undang Dasar dan Ketentuan MPR

Hukum perlindungan konsumen mendapat landasan hukumnya pada undang-undang dasar 1945, pembukaan, alinea ke-4 berbunyi “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia”. Menurut Az. Nasution kata “melindungi” mengandung asas perlindungan (hukum) pada segenap bangsa tersebut. Perlindungan hukum pada segenap bangsa itu tentulah bagi segenap bangsa tanpa terkecuali. Baik ia laki-laki atau perempuan, orang kaya atau orang miskin, orang kota atau orang desa, orang asli atau keturunan dan pengusaha/pelaku usaha atau konsumen.⁶

Selain itu, salah satu TAP-MPR 1993 yang disusun dalam satu baris kalimat tertang kaitan produsen dan konsumen. Susunan kalimat tersebut berbunyi “.....meningkatkan pendapatan produsen dan melindungi kepentingan konsumen”. Sifat kepentingan khusus produsen (lebih tepat pelaku usaha atau pengusaha) telah ditunjukkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pengusaha dalam menjalankan kegiatan memproduksi atau berdagang menggunakan barang

⁶Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 49-50.

atau jasa sebagai bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong, atau bahan pelengkap. Kepentingan mereka dalam menggunakan barang atau jasa adalah untuk kegiatan usaha memproduksi dan/atau berdagang itu, adalah untuk meningkatkan pendapatan atau pengkasilan mereka (tujuan komersial). Adapun bagi konsumen, penggunaan barang dan jasa adalah untuk memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga, atau rumah tangga (nonkomersial). Semata-mata untuk memenuhi kebutuhan raga dan jiwa konsumen.⁷

b. Hukum Perdata

KUH Perdata memuat berbagai kaidah hukum berkaitan dengan hubungan hukum dan masalah antara pelaku usaha penyedia barang dan/atau jasa dengan konsumen pengguna barang dan/atau jasa tersebut. Terutama buku kedua, buku ketiga, dan buku keempat memuat berbagai kaidah hukum yang mengatur hubungan konsumen dan penyedia barang atau jasa konsumen tersebut. Begitu pula dalam KUHD, baik buku pertama, maupun buku kedua, mengatur tentang hak-hak dan kewajiban yang terbit dari, khususnya jasa.⁸

Selain itu, Secara spesifik pembahasan Perbuatan Melawan Hukum Indonesia yang berasal dari Eropa Kontinental diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata sampai dengan pasal 1380 KUH Perdata. Pasal-pasal tersebut mengatur bentuk tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum. Adapun yang khusus terkait

⁷Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 51.

⁸Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan*, h. 51

dengan hukum perlindungan konsumen yaitu pasal 1367 ayat 1 KUH Perdata yang menyatakan “seseorang tidak hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri tetapi juga disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya”. Dalam hal ini tanggung jawab tidak hanya karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan diri sendiri tetapi juga berkenaan dengan perbuatan melawan hukum orang lain dan barang-barang di bawah pengawasannya.⁹

c. Hukum Publik

Hukum publik dimaksudkan hukum yang mengatur hubungan anatar Negara dan alat-alat perlengkapannya atau hubungan antara Negara dengan perorangan. Termasuk hukum publik dan terutama dalam kerangka hukum konsumen dan/atau hukum perlindungan konsumen, adalah hukum administrasi Negara, hukum pidana, hukum acara perdata dan/atau hukum acara pidana dan hukum internasional khususnya hukum perdata internasional. Jadi segala kaidah hukum maupun asas hukum ke semua cabang-cabang hukum publik itu sepanjang berkaitan dengan hubungan hukum konsumen dan/atau masalahnya dengan penyedia barang atau jasa, dapat pula diberlakukan.¹⁰ Semua ketentuan

⁹Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 55.

¹⁰Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan*, h. 59.

perundang-undangan dalam hukum publik yang berkaitan dengan hukum perlindungan konsumen bertujuan memberikan perlindungan terhadap konsumen.

2. Hak-Hak dan Kewajiban Konsumen

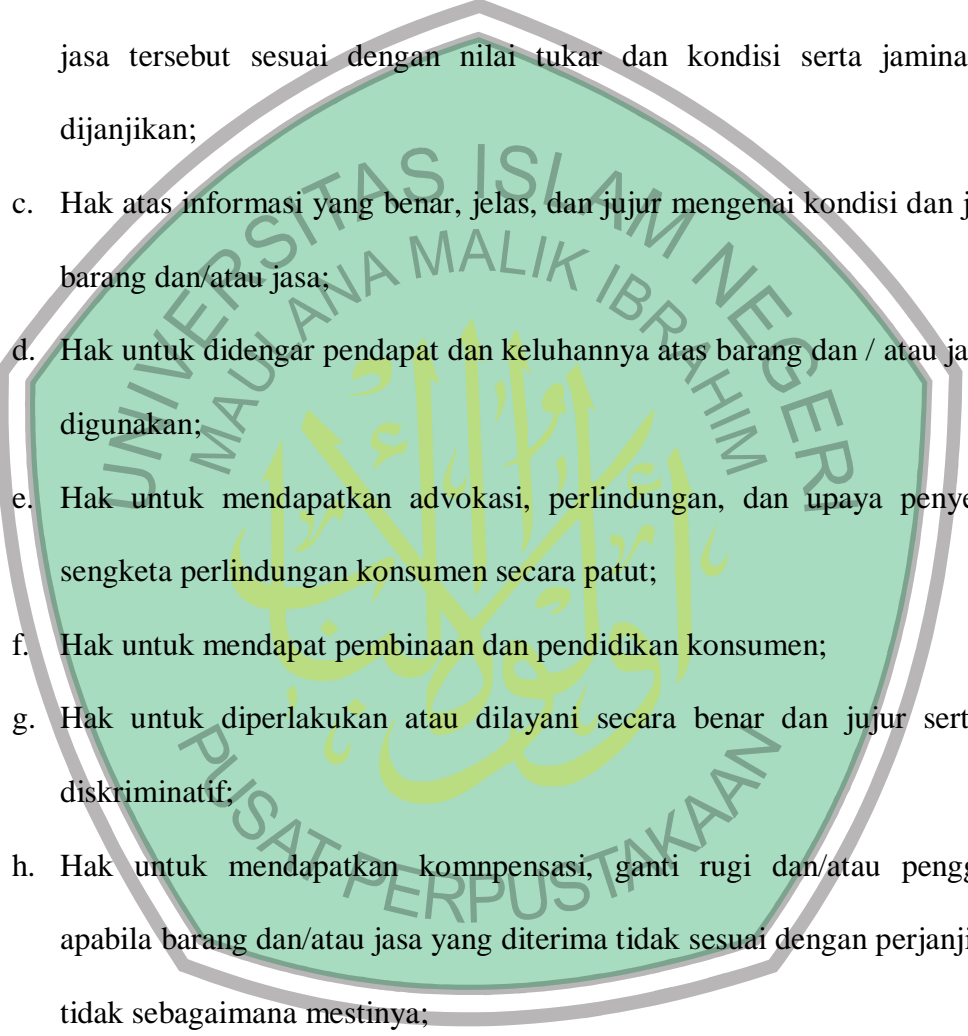
Proses transaksi pasti menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang melakukan transaksi. Pada umumnya transaksi terjadi dalam kegiatan bisnis yang terdiri atas produsen dan konsumen. Oleh karena itu, perlu perlindungan hukum bagi keduanya guna mendapatkan perlindungan. Adapun secara materi perlindungan yang diharapkan tidak sekedar perlindungan secara fisik melainkan terlebih-lebih hak-haknya yang bersifat abstrak.

Secara umum dikenal ada 4 (empat) hak-hak dasar konsumen, antara lain adalah :

- a. Hak untuk mendapat keamanan.
- b. Hak untuk mendapat informasi.
- c. Hak untuk memilih.
- d. Hak untuk didengar.¹¹

Sedangkan hak-hak konsumen sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen antara lain adalah :

¹¹Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 31.

- 
- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
 - b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
 - c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
 - d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan / atau jasa yang digunakan;
 - e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
 - f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
 - g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
 - h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
 - i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak-hak dan kewajiban merupakan satu kesatuan yang sulit dipisahkan karena memiliki kaitas yang sangat erat sehingga tidak hanya hak yang selalu dituntut melainkan jika hak-hak ingin dipenuhi maka kewajiban harus dipenuhi

terlebih dahulu. Adapun kewajiban konsumen sebagaimana pada Pasal 5 UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen antara lain adalah :

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
 - b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
 - c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
 - d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut;
3. Hak-Hak dan Kewajiban Produsen atau Pelaku Usaha

Kajian atas perlindungan terhadap konsumen tidak dapat dipisahkan dari telaah terhadap hak-hak dan tanggung jawaban produsen. Hak-hak produsen dapat ditemukan antara lain pada factor-faktor yang membebaskan produsen dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh konsumen, meskipun kerusakan timbul akibat cacat pada produk, yaitu apabila :

- a. Produk tersebut sebenarnya tidak diedarkan;
- b. Cacat timbul dikemudian hari;
- c. Cacat timbul setelah produk berada di luar control produsen;
- d. Barang yang diproduksi secara individual tidak untuk keperluan produksi;
- e. Cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan yang ditetapkan oleh penguasa;¹²

¹²Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 42.

Sedangkan hak-hak produsen sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen antara lain adalah :

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan / atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;

Adapun kewajiban produsen sebagaimana pada Pasal 7 UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen antara lain adalah :

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian;

C. Konsep Dasar Perdagangan (jual-beli)

1. Definisi perdagangan atau jual beli

Menurut etimologi, jual-beli dapat diartikan sebagai berikut :

مُقَابَلَةً الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ

Artinya : “*pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain).*”

Kata lain dari *al-ba’I* adalah *asy-syira’*, *al-mubadah*, dan *at-tijarah*. Adapun yang berkenaan dengan kata *at-tijarah* yaitu sebagaimana dalam Al-Quran surat *Fathir* ayat 29 dinyatakan :

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

Artinya : "mereka mengharapkan tijarah (perdagangan) yang tidak akan merugi" (QS : Fathir : 29).

Adapun jual beli menurut terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain :

a. Menurut ulama Hanafiyah :

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

Artinya : "pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan)".

b. Menurut Imam Nawawi dalam *Al-Majmu'* :

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِيكًا

Artinya : "pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan".

c. Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab *Al-Mugni* :

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِالْمَالِ تَمْلِيكًا وَ تَمْلُكًا

Artinya : "pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadikan milik".¹³

¹³Rachmat Syaifei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 73-74.

Selain itu, menurut Pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'i* adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.

2. Rukun (Unsur) Jual Beli

Rukun jual beli terdiri atas 3 (tiga), yaitu :

- a. Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli;
- b. Objek transaksi, yaitu harga dan barang;
- c. Akad (transaksi), yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan itu berbentuk kata-kata maupun perbuatan;

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, unsur jual beli ada 3 (tiga) yaitu :

- a. Pihak-pihak. Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.
- b. Objek. Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud, yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.
- c. Kesepakatan. Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat,

3. Syarat Sahnya Jual Beli

Suatu jual beli tidak sah bila tidak terpenuhi dalam suatu akad 7 (tujuh) syarat, yaitu :

- a. Saling rela antara kedua belah pihak.
 - b. Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah balig, berakal, dan mengerti.
 - c. Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua pihak.
 - d. Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama.
 - e. Objek transaksi adalah barang yang bias diserahterimakan.
 - f. Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad.
 - g. Harga harus jelas saat transaksi.¹⁴
4. Hukum Jual Beli

Jual beli telah disahkan oleh Al-Qur'an, sunnah, dan *Ijma'*. Adapun dalil Al-Qur'an adalah sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-baqarah ayat 275 yang berbunyi :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

¹⁴Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* (Jakarta: kencana, 2012), h. 102-104.

فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

Selain itu, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat an-nisa ayat 29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Adapun dalil sunnah di antaranya adalah hadist yang diriwayatkan dari rasulullah SAW. Beliau bersabda : “sesungguhnya jual beli itu atas dasar saling ridha.” Ketika ditanya usaha apa yang paling utama, beliau menjawab : “usaha seseorang dengan tangannya sendiri, dan setiap jual beli yang mabrur.” Jual beli yang mabrur adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan

dusta adalah penyamaran dalam barang yang dijual, dan penyamaran itu adalah menyembunyikan aib barang dari penglihatan pembeli. Adapun makna khianat itu lebih umum dari itu, sebab selain menyamarkan bentuk barang yang dijual, sifat, atau hal-hal luar seperti dia menyifatkan dengan sifat yang tidak benar atau memberitahu harta yang dusta.

Adapun dalil *ijma'* adalah bahwa ulama sepakat tentang halalnya jual beli dan haramnya riba, berdasarkan ayat dan hadis tersebut.¹⁵

D. Jual Beli *Salam* (Pesanan)

1. Definisi Jual Beli *Salam* (Pesanan)

Salam sinonim dengan *salaf*. Dikatakan *aslama al-tsauba lil-khiyath*, artinya ia memberikan/menyerahkan pakaian untuk dijahit. Dikatakan salam karena orang yang memesan menyerahkan harta pokoknya dalam majlis. Dikatakan salam karena ia menyerahkan uangnya terlebih dahulu sebelum menerima barang dagangannya. Adapun *salam* secara terminologi adalah transaksi terhadap sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam suatu tempo dengan harga yang diberikan kontan di tempat transaksi.¹⁶

¹⁵Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* (Jakarta: kencana, 2012), h. 103.

¹⁶Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, h. 113.

Dalam pengertian yang sederhana, jual beli dengan sistem inden (*bai' as-salam*) berarti pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sementara pembayarannya dilakukan di muka.¹⁷

Menurut pendapat Zuhaily, jual beli sistem pesanan (*bai' as-salam*) merupakan transaksi jual beli barang pesanan di antara pembeli (*musalam*) dan penjual (*musalam ilaihi*). Spesifikasi dan harga pesanan harus sudah disepakati di awal transaksi, sedangkan pembayarannya dilakukan di muka secara penuh. Selanjutnya, Zuhaily mengemukakan pendapat ulama Safiyyah dan Hanabilah, *salam* adalah transaksi atas pesanan dengan spesifikasi tertentu yang ditangguhkan penyerahannya pada waktu tertentu yang pembayarannya dilakukan secara tunai di majelis akad.¹⁸

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *salam* adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembiayaannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang.¹⁹

2. Rukun dan Syarat *Salam*

Sebagaimana jual beli, dalam akad *salam* harus terpenuhi rukun dan syaratnya.

Adapun rukun *salam* menurut jumhur ulama ada 3 (tiga) yaitu :

a. *Shighat*, yaitu ijab dan Kabul;

¹⁷ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 125.

¹⁸ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik*, h. 125.

¹⁹ Pasal 20 ayat (34).

- b. *'aqidani* (dua orang yang melakukan transaksi), yaitu orang yang memesan dan orang yang menerima pesanan; dan
- c. Objek transaksi, yaitu harga dan barang yang dipesan;

Sementara syarat-syarat jual beli dengan sistem pemesanan sebagai berikut ;

- a. Uang dibayar di tempat akad, Berarti pembayaran dilakukan terlebih dahulu.
 - b. Barangnya menjadi utang bagi penjual.
 - c. Barangnya dapat diberikan sesuai waktu yang dijanjikan, Berarti pada waktu dijanjikan barang itu harus sudah ada.
 - d. Barang tersebut hendaklah jelas ukurannya, takarannya, ataupun bilangannya, menurut kebiasaan cara menjual barang semacam itu.
 - e. Diketahui dan disebutkan sifat-sifat dan macam barangnya dengan jelas. Agar tidak ada keraguan yang akan mengakibatkan perselisihan antara kedua belah pihak.
 - f. Disebutkan tepat menerimanya.²⁰
3. Landasan Hukum Jual Beli Salam

Jual beli dengan sistem pesanan (*salam*) diperbolehkan, berlandaskan pada firman Allah SWT dalam surat *Al-baqarah* ayat 282 yang berbunyi :

²⁰Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 113-114.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ
الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُهُ بِالْعَدْلِ ؕ وَأَسْتَشْهِدُوا
شَهِيدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ
الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا
دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ؕ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ
وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ؕ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ
فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ؕ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ؕ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ
وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ؕ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bernu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan

persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”

Selain itu, jual beli pesanan (*salam*) diperbolehkan, berlandasan pada sabda Rasulullah SAW. yang berbunyi :

“Barangsiapa melakukan salam pada sesuatu, hendaklah ia melakukan salam dalam takaran tertentu, berat tertentu, dan waktu tertentu” (HR.Muslim).²¹

4. Perbedaan *Salam* dan *Istishna'*

Menurut Zuhaili perbedaan-perbedaan antara *salam* dengan *Istishna'* adalah sebagai berikut :

- a. Objek transaksi dalam *salam* merupakan tanggungan dengan spesifikasi kualitas ataupun kuantitas, sedangkan *istishna'* berupa zat/barangnya.
- b. Dalam kontrak *salam* adanya jangka waktu tertentu untuk menyerahkan barang pesanan, hal ini tidak berlaku dalam akad *istishna'*.
- c. Kontrak *salam* bersifat mengikat (*lazim*), sedangkan *istishna'* tidak bersifat mengikat (*ghairu lazim*).
- d. Dalam kontrak *salam* persyaratan untuk menyerahkan modal atau pembayaran saat kontrak dilakukan dalam majelis kontrak, sedangkan *salam istishana'*

²¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 126.

dapat dibayar di muka, cicilan atau waktu mendatang sesuai dengan kesepakatan.²²

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, perbedaan-perbedaan antara *salam* dengan *istishna* sebagai berikut :

- a. Akad *salam* terikat dengan adanya ijabdan kabul seperti dalam penjualan biasa.²³ sedangkan *istishna* mengikat setelah masing-masing pihak sepakat atas barang yang dipesan.²⁴
- b. Jual beli *salam* dapat dilakukan dengan syarat kuantitas dan kualitas barang sudah jelas.²⁵ Sedangkan *istishna* dapat dilakukan pada barang yang dapat dipesan.²⁶

²²Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 131.

²³Pasal 100 ayat (1)

²⁴Pasal 104

²⁵Pasal 101 ayat (1)

²⁶Pasal 105